

SINOPSIS

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah paradigma baru yang berkembang di Indonesia saat ini. *Good governance* muncul dari berbagai tuntutan masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang prima, transparan, akuntabel, dan efisien. Pelaksanaan *good governance* harus dimulai dari jenjang pemerintahan lokal hingga jenjang pemerintahan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mengambil judul skripsi “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011)”. Skripsi ini merupakan studi deskriptif di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan publik dan administratif dengan menerapkan prinsip *good governance*. Dalam skripsi ini peneliti akan meneliti tentang “Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance*, Khususnya Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh pada Tahun 2011?”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan mengukur, memberikan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh pada tahun 2011. Pengumpulan data yang dilakukan dilapangan tidak hanya dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, namun juga digabungkan dengan menggunakan teknik kuesioner guna memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

Hasil penelitian penelitian yang didapat menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik. Hasil ini didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat dan hasil dari wawancara dengan beberapa aparatur Kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kecamatan Samigaluh. dari hasil penelitian tersebut diketahui indeks transparansi sebesar 2,78 atau dalam kategori baik dan indeks partisipasi sebesar 2,79 atau dalam kategori baik. Selain itu juga diketahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi. Faktor-faktor tersbut secara berurutan adalah sebagai berikut : faktor kepemimpinan, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor penerapan kebijakan, faktor pers dan media massa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi dan partisipasi di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik dan mengarah kepada perkembangan yang lebih baik lagi. Saran bagi pihak aparatur Kecamatan Samigaluh adalah pihak Kecamatan sebagai penyedia layanan harus lebih mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan menciptakan inovasi